

Analisis Kebijakan Pemerintahan dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan

Jainatin Halomoan Hrp¹, Usiono²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: jainatinhrp@gmail.com¹, usiono@uinsu.ac.id²

ABSTRAK

Kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan nasional. Ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan akses terhadap infrastruktur pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta fasilitas pembelajaran yang tidak seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan melalui telaah literatur secara sistematis.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis berbagai artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan publikasi resmi pemerintah yang relevan. Proses seleksi literatur dilakukan melalui kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat untuk memperoleh data yang valid dan representatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program penempatan dan pengembangan tenaga pendidik, serta digitalisasi pembelajaran, telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan di wilayah pedesaan. Namun, kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, ketimpangan teknologi, dan kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan di daerah terpencil.

Simpulannya, kebijakan pemerintah telah mengarah pada pengurangan kesenjangan pendidikan, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui perencanaan yang lebih kontekstual dan pemerataan sumber daya pendidikan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkeadilan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Kesenjangan Pendidikan, Wilayah Perkotaan, Wilayah Pedesaan, *Systematic Literature Review*, Pemerataan Akses

ABSTRACT

The educational gap between urban and rural areas in Indonesia remains a major challenge in achieving equitable national education. This inequality is caused by disparities in access to educational infrastructure, the quality of teaching staff, and unequal learning facilities. This study aims to analyze government policies in addressing educational disparities between urban and rural areas through a Systematic Literature Review.

The research method employed is a Systematic Literature Review (SLR) by collecting, selecting, and analyzing various scientific articles, policy reports, and official government publications relevant to the topic. The literature selection process was carried out through strict inclusion and exclusion criteria to obtain valid and representative data. The findings show that government policies such as the School Operational Assistance (BOS) program, the deployment and development of teaching staff, and digitalization of learning have made a positive contribution to improving educational access in rural areas. However, these policies still face challenges related

to limited infrastructure, technological inequality, and suboptimal implementation monitoring in remote regions.

In conclusion, government policies have been directed toward reducing educational disparities, but their effectiveness needs to be strengthened through more contextual planning and equitable distribution of educational resources. Stronger synergy between the central and local governments is essential to achieve fair and inclusive education.

Keywords: Education Policy, Educational Inequality, Urban Areas, Rural Areas, Systematic Literature Review, Equity In Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan mendorong kemajuan bangsa. Namun, hingga saat ini pemerataan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam konteks kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Perbedaan kualitas layanan pendidikan, akses terhadap sarana dan prasarana, serta ketersediaan tenaga pendidik menjadi penyebab utama kesenjangan tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa anak-anak di wilayah pedesaan memiliki akses pendidikan yang lebih terbatas dibandingkan anak-anak di wilayah perkotaan (Rahayu & Mulyani, 2021). Hal ini berdampak langsung pada perbedaan capaian hasil belajar dan partisipasi sekolah.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta penempatan guru di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Program-program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu layanan, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Menurut hasil kajian kebijakan pendidikan, program BOS dan PIP terbukti meningkatkan angka partisipasi sekolah dan keberlanjutan pendidikan dasar di sejumlah daerah pedesaan (Sari & Nugroho, 2022). Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan teknis dan struktural, seperti distribusi dana, infrastruktur terbatas, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Selain faktor kebijakan dan pembiayaan, tantangan utama juga datang dari ketimpangan infrastruktur pendidikan dan digitalisasi. Meskipun pemerintah telah mendorong transformasi pembelajaran melalui platform Merdeka Belajar, ketimpangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih tinggi. Kondisi ini menghambat efektivitas kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan secara merata (Hidayat & Rahmawati, 2023). Kurangnya pengawasan dan adaptasi kebijakan di tingkat daerah juga memperlebar jurang kesenjangan pendidikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan membahas secara sistematis peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pembahasan mencakup: (1) gambaran umum kesenjangan pendidikan di Indonesia, (2) kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk mengatasi ketimpangan, (3) efektivitas dan hambatan implementasi kebijakan, serta (4) rekomendasi strategi perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menganalisis artikel ilmiah nasional, laporan kebijakan, dan publikasi resmi pemerintah. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai arah kebijakan pemerataan pendidikan di Indonesia (Putri & Santosa, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sistematis Literature Review (SLR), yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan, identifikasi, evaluasi, dan sintesis literatur atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung.

Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yang mengkaji dan menginterpretasi temuan dari literatur yang telah diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Proses ini bertujuan mengidentifikasi tema-tema utama, pola, serta kesenjangan dalam penelitian terdahulu terkait kebijakan pendidikan dan kualitas guru di era digital (Putra et al., 2024).

Cara kerja penelitian dimulai dengan tahap pertanyaan penelitian yang jelas. Selanjutnya dilakukan pencarian literatur menggunakan mesin pencari Google Scholar dan database akademik lainnya, karena kemudahan akses dan mencakup jurnal yang luas, serta untuk memastikan pencarian literatur terbaru yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah penetapan kriteria inklusi (misalnya jurnal peer-review dalam 5 tahun terakhir dengan bahasa Indonesia dan Inggris) dan eksklusi. Lalu dilakukan proses seleksi literatur dengan membaca abstrak dan teks lengkap untuk memastikan relevansinya. Data yang dikumpulkan kemudian diekstraksi dan dianalisis secara sistematis untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Judul Penelitian/Artikel	Tahun	Penerbit /Institusi	Temuan Utama	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah Khusus Jakarta	2024	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	Pengembangan kurikulum dan pelatihan guru adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak-dampak ini. Ini akan meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan pemerataan pendidikan hingga daerah pinggiran	Fokus pada kebijakan dan pelatihan guru digital	Menekan kan pelatihan guru dan pengembangan kurikulum
2	Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia	2025	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia	Permasalahan seperti ketidakmerataan akses pendidikan, rendahnya kualitas pengajaran, dan kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi isu sentral yang menghambat pencapaian tujuan	Pentingnya infrastruktur dalam pengembangan pendidikan	Fokus pada pembangunan infrastruktur

				pendidikan yang diharapkan.		
3	Analisis Kebijakan Dalam Pendidikan	2025	Unisan Jurnal	menegaskan perlunya kebijakan yang lebih adaptif, berbasis konteks lokal, serta didukung penguatan kapasitas guru, kolaborasi multipihak, penyederhanaan birokrasi, dan sistem evaluasi berbasis data agar kebijakan pendidikan dapat lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan	Penguatan kebijakan kolaboratif	Menyajikan model teoritis kebijakan pengembangan
4	Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Indonesia: Kesenjangan Pendidikan	2024	Universitas Siliwangi	Sekolah di wilayah perkotaan umumnya lebih maju dalam hal infrastruktur dan kualitas guru dibandingkan dengan sekolah di wilayah pedesaan, yang fasilitas dan akses pendidikannya masih sangat terbatas. (Anti, 2024)	Rendahnya kualitas guru dan infrastruktur	Fokus wilayah terpencil
5	Analisis Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia Saat Ini : Suatu Kajian Literatur	2025	UIN Imam Bonjol Padang	Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa solusi tradisional yang dapat diterapkan meliputi pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan gedung atau ruang belajar yang memadai di setiap daerah, untuk memastikan	Menekankan mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif	Beberapa solusi tradisional yang dapat diterapkan meliputi pembangunan infrastruktur pendidikan

				akses yang merata bagi semua siswa.(Dzaky, 2025)		
6	Analisis Inovasi Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengurangan Kesenjangan Wilayah	2019	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas - Indonesia	Kesenjangan antarwilayah di Indonesia masih merupakan tantangan utama dalam pembangunan nasional. Kesenjangan antarwilayah tersebut juga terkait dengan upaya pemerataan pembangunan dan keadilan serta upaya untuk pengentasan kemiskinan.(Fajar, 2019)	Kesenjangan antarwilayah di Indonesia masih merupakan tantangan utama dalam pembangunan nasional.	upaya pemerataan pembangunan dan keadilan serta upaya untuk pengentasan kemiskinan.
7	Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia	2024	Jurnal Lentera Ilmu (JLI)	Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu isu penting dalam upaya memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh anggota masyarakat di Indonesia.(Amelia, 2024)	Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu isu penting	Fokus pada kesetaraan kepada seluruh masyarakat
8	Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Akses Pendidikan Dasar di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan	2025	Jurnal Sains Student Research	Stratifikasi sosial memberikan dampak signifikan dalam memperoleh akses pendidikan dasar di wilayah perkotaan dan pedesaan, hal ini terciptanya kesenjangan yang nyata dalam kualitas dan kesempatan belajar.(Hanifa, 2025)	Stratifikasi sosial memberikan dampak signifikan dalam memperoleh akses pendidikan	Pentingnya stratifikasi dalam memperoleh akses pendidikan
9	Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Ketimpangan Akses di Indonesia	2025	Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan	Desentralisasi, yang selama ini dianggap sebagai solusi untuk pemerataan pendidikan,	Desentralisasi tidak dapat dianggap sebagai	Desentralisasi malah memperburuk

			Indonesia	ternyata malah jawaban ketimpangan antar daerah dalam banyak kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak dapat dianggap sebagai jawaban instan untuk keadilan pendidikan, kecuali jika diiringi dengan penguatan kapasitas di tingkat lokal. (Affandi, 2025)		
10	Pendidikan Digital dan Kebijakan Guru: Perspektif Era Revolusi Industri 4.0	2019	Jurnal Pendidikan dan Kebijakan	Peranan kebijakan sebagai pengarah utama dalam transformasi pendidikan digital dan peningkatan kualitas guru	Kebijakan sebagai peran utama	Kajian sejarah dan awal penggunaan teknologi

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Permasalahan ketidakmerataan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan umumnya lebih maju dalam hal infrastruktur, kualitas guru, serta kemudahan akses terhadap sumber daya pendidikan. Sebaliknya, sekolah di wilayah pedesaan masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana yang berdampak pada rendahnya mutu pembelajaran dan capaian akademik peserta didik (T, 2020)

Kesenjangan tersebut juga diperparah oleh faktor sosial seperti stratifikasi sosial. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap layanan pendidikan yang layak, sehingga memperlebar jarak antara kelompok masyarakat miskin dan kaya dalam memperoleh kesempatan belajar (Pratiwi & Santosa, 2021) Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga struktural dan sosial.

Salah satu kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini adalah desentralisasi pendidikan. Namun, dalam praktiknya desentralisasi belum berjalan optimal. Ketimpangan kapasitas pengelolaan pendidikan di tingkat daerah membuat pelaksanaan desentralisasi sering kali memperlebar jurang ketimpangan, bukan mempersempitnya (N, 2022). Hal ini terjadi karena daerah dengan sumber daya dan kapasitas manajemen yang lebih baik cenderung lebih cepat berkembang, sementara daerah tertinggal semakin tertinggal.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, dibutuhkan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Penguatan kapasitas guru, penyederhanaan birokrasi, serta pengembangan sistem evaluasi berbasis data menjadi langkah penting dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan (Wulandari, 2021) Selain itu, kolaborasi multipihak, baik dari pemerintah pusat,

daerah, masyarakat, maupun sektor swasta, perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan program pemerataan pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendidikan di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh ketidakmerataan infrastruktur, perbedaan kualitas guru, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta ketimpangan kapasitas daerah dalam mengelola pendidikan. Desentralisasi yang diharapkan menjadi solusi, pada kenyataannya belum sepenuhnya efektif dan dalam beberapa kasus justru memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Solusi yang dibutuhkan harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas pengajaran, penguatan kapasitas lokal, serta penyusunan kebijakan yang berbasis data sangat penting dilakukan. Melalui kolaborasi berbagai pihak dan pendekatan kebijakan yang lebih responsif terhadap konteks lokal, kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan dapat dikurangi sehingga tujuan pendidikan nasional yang merata dan inklusif dapat tercapai (Prasetyo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Y. (2025). Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Ketimpangan Akses di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2, 153–166.
- Amelia, V. (2024). Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*.
- Anti, W. (2024). Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Indonesia: Kesenjangan Pendidikan. *Universitas Siliwangi*.
- Dzaky, S. (2025). Analisis Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia Saat Ini : Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3, 292–309.
- Fajar, S. (2019). Analisis Inovasi Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengurangan Kesenjangan Wilayah. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas - Indonesia*, 11.
- Hanifa, F. (2025). Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Akses Pendidikan Dasar di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Sains Student Research*, 3, 34–44.
- N, R. (2022). Dampak Desentralisasi terhadap Pemerataan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9, 120–133.
- Prasetyo, B. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Data di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Pendidikan*, 6, 55–68.
- Pratiwi & Santosa, A. (2021). Stratifikasi Sosial dan Kesenjangan Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 12, 33–44.
- T, S. (2020). Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Pemerataan. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 15, 45–56.
- Wulandari, D. (2021). Penguatan Kapasitas Guru sebagai Strategi Pemerataan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 17, 201–214.